

REVITALISASI PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

Siful Arifin

Dosen STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep

Abstract

Setiap sistem dan lembaga pendidikan, tak terkecuali pendidikan Islam bertujuan untuk memberi pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat, agar masyarakat mampu menghadapi dan dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Namun kenyataannya, sampai saat ini, pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia belum mampu menjadi solusi tepat bagi masyarakat Islam. Sebagian besar masyarakat Islam masih terjerat dengan masalahnya sendiri-sendiri. Hal ini kemudian memunculkan suatu pesimisme di kalangan masyarakat dan menjadikan pendidikan Islam semakin terpinggirkan dihadapan masyarakatnya sendiri. Kondisi ini, memunculkan suatu kegelisahan tersendiri dikalangan intelektual Islam sehingga memunculkan suatu pemikiran untuk melakukan suatu re-vitalisasi terhadap lembaga pendidikan Islam. Re-vitalisasi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan jati diri pendidikan Islam yang dalam sejarah telah terbukti mampu untuk menjawab dan menjadi solusi bagi masyarakat Islam. Upaya revitalisasi ini bisa dilakukan di lembaga pendidikan formal, non-formal dan informal. Ruang lingkup dan aspek revitalisasi dalam tiga pendidikan yang dimaksud bisa berbeda-beda. Di antaranya; 1). Revitalisasi terhadap paradigma dan ideologi pendidikan masyarakat. 2). Revitalisasi terhadap design kurikulum yang ditawarkan. 3) Revitalisasi terhadap sumber ekonomi lembaga pendidikan.4). Revitalisasi terhadap lingkungan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Keywords: Revitalisasi, Pendidikan Islam, Masyarakat

Pendahuluan

Hampir sebagian besar masyarakat percaya, bahwa pendidikan masih merupakan cara yang paling baik untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, banyak anggota masyarakat yang terus berusaha dengan sekuat tenaga dan daya upaya yang dimilikinya untuk menyekolahkan anaknya,

Siful Arifin

setidaknya sampai lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat. Bahkan, tidak sedikit pula anggota masyarakat yang terus mendorong dan memotivasi anaknya agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga bisa meraih gelar sarjana, magister dan Doctor bahkan sampai meraih gelar tertinggi yakni, gelar professor.

Namun demikian, sudah sering kali terjadi bahwa kenyataan sering kali berbeda dengan harapan. Dunia pendidikan kita belum mampu menjadi penopang harapan dan cita-cita luhur masyarakat kita. Permasalahan pendidikan kita sangatlah kompleks sehingga *out put* pendidikan kita sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Al-hasil, *out put* yang semestinya bisa dinikmati oleh masyarakat malah menjadi beban masyarakat. Beberapa indikasi dari keadaan tersebut adalah adanya pengangguran berpendidikan, lulusan pendidikan yang bekerja atau berprofesi tidak sesuai dengan jurusannya.¹ Kualitas keilmuan yang masih rendah dan lain sebagainya.

Dari sekian masalah yang dikandung oleh dunia pendidikan kita saat ini, tidak terkecuali oleh pendidikan Islam adalah semakin sempitnya ruang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dunia pendidikan. Era modern yang bercirikan demokratisasi telah mengalami paradoks yang sangat luar biasa. Demokratisasi yang berlandaskan “kebebasan” seakan-akan tidak berlaku dalam dunia pendidikan. Ini bisa dilihat dari semakin dibatasinya peran dan partisipasi masyarakat untuk ikut bersama-sama merumuskan design, proses dan sistem pendidikan yang akan dilaksanakan. Dengan dalih profesionalisme para stakeholder pendidikan telah mencabut eksistensi dan fungsi masyarakat sebagai sentral pendidikan. Masyarakat hanya dijadikan user; objek pengguna layanan pendidikan. Kondisi seperti ini kemudian menyebabkan pendidikan semakin jauh dari masyarakat.

Secara normatif, keterlibatan masyarakat secara aktif partisipatif dalam pendidikan sebenarnya sudah menjadi agenda pemerintah, ini terlihat dari adanya undang-undang yang menagatur adanya hal tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 55 disebutkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang disebut pendidikan

¹ Bagi sebagian kalangan, berprofesi tidak sesuai dengan spesialisasi keilmuan yang dipilihnya merupakan kelebihan, ada juga yang mengatakan itu adalah berkah. Saya kira, pendapat tersebut dari sisi social-agama masih bisa dicarikan pijakannya. Namun dari sisi normatif keilmuan pendidikan, itu adalah penyimpangan, ab-normal, dunia kedokteran menyebutnya sebagai mala-praktek.

berbasis masyarakat (*community-based education*) “untuk kepentingan masyarakat”. Akan tetapi, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat ini harus tetap mengikuti dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Namun, jika dicermati, aturan ini masih setengah hati. Dalam bunyi UU tersebut pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk menggagas pendidikan berbasis masyarakat tapi kurikulum dan evaluasi pendidikannya masih harus mengikuti pemerintah. Hal ini tentu menjadi masalah, karena masyarakat juga setengah hati terlibat dalam pendidikan sebagaimana terlihat selama ini.

Ditinjau dari aspek sejarah, pada masa lalu, masyarakat kita sangat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan pendidikan. Banyak yayasan-yasan dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh masyarakat untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat. Menurut Azyumardi Azra, di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dari *rangkang*, *dayah*, *meunasah* (Aceh), *surau* (Minangkabau), *pesantren* (Jawa), *bustanul atfal*, *diniyah* dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim sendiri. Kondisi ini sungguh berbanding terbalik dengan kondisi hari ini. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia sebenarnya telah dapat diterapkan sejak awal secara praktis. Namun, pada dataran teoritis, pendidikan berbasis masyarakat belum memiliki konsep dan teori yang jelas. Hal ini menjadi salah satu kendala terhadap penerapan pendidikan berbasis masyarakat.

Melihat berbagai fenomena di atas, penulis berpandangan perlunya upaya revitalisasi semangat, ideologi, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan model-model pendidikan Islam yang pernah ada dalam sejarah. Lembaga Pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, khuttab, dan masjid dikenal mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar dan juga mampu melahirkan masyarakat yang cerdas dan kreatif sehingga mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan baik dan elegant, tanpa tergantung kepada pihak lain.

Revitalisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk membangkitkan, menghidupkan dan menumbuhkan kembali semangat atau daya hidup (*vitality*)

setelah mengalami masa-masa kemunduran dan kemorosotan.² Hubungannya dengan pendidikan Islam, maka upaya revitalisasi bisa dilakukan dalam pendidikan formal seperti madrasah, atau perguruan tinggi Islam dan bisa juga dilakukan dalam pendidikan non-formal seperti pesantren dan tempat-tempat kursus yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Selain dalam dua pendidikan ini, revitalisasi juga bisa dilakukan dalam pendidikan informal seperti pendidikan Islam yang dilakukan oleh keluarga. Upaya revitalisasi dalam setiap model pendidikan tersebut berbeda-beda tergantung dari kebutuhannya.

Pendidikan Islam; Sebuah Tinjauan filosofis-historis

Bagi manusia, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital. Watak dan karakter manusia dalam menjalani proses kehidupannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang digelutinya. Tengoklah disekitar kita dan bandingkan. Samakah orang mengenyam pendidikan dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan? Samakah orang yang lulusan SD dengan lulusan sarjana? Samakah orang yang menempuh pendidikan agama dan orang yang tidak menempuh pendidikan agama? Jawabannya pasti tidak sama. Dengan demikian, sudah jelas bahwa pendidikan sangat menentukan warna-warni kehidupan seseorang. Dengan kata lain pendidikan sangat menentukan nasib dan nasib seseorang di dunia maupun di akhirat.

Dari gambaran singkat diatas, dapat kita ketahui bahwa kualitas kita (manusia) ditentukan juga oleh kualitas pendidikannya. Karena sangat urgennya arti pendidikan bagi kita maka konsepsi pemahaman kita tentang pendidikan juga tak kalah penting. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dibahas tentang konsepsi pendidikan dari beberapa tinjauan.

Dari sisi etimology, istilah pendidikan bisa ditinjau dari beberapa bahasa, dalam bahasa Yunani misalnya, pendidikan disebut *paedagogos* yang berarti pergaulan dengan anak. *Paedagogos* berasal dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing, memimpin). Dalam kebiasaan orang Yunani, istilah *paedagogos* digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas antar-jemput anak-anak ke an dari sekolah yang dilakukan oleh seorang pelayan atau bujang. Jadi, di Yunani istilah *paedagogos* digunakan untuk sesuatu yang rendah, namun pada perkembangannya istilah ini dinisbatkan terhadap suatu aktivitas yang mulia, yakni aktivitas

² Revitalisasi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris *revitalization*, akar katanya *revitalize*. Di dalam *webster's new world dictionary*, 3rd college edition (1988), disebutkan *revitalize* berarti *to bring vitality, vigor, etc. Back to after a decline*.

mendidik.³ Sedangkan dalam bahasa Arab, ada beberapa kata yang maknanya dikaitkan dengan kata pendidikan diantaranya adalah; *at-tarbiyah*, *al-ta'lim*, *al-ta'dib*, beberapa kata tersebut mempunyai makna yang saling berkaitan, saling cocok untuk disepadankan dengan istilah pendidikan.⁴ Sementara dalam bahasa Inggris istilah pendidikan dikenal dengan sebutan *education*, berasal dari kata *to educate*, yang berarti mengasuh, mendidik kemudian maknanya berkembang menjadi suatu aktivitas pengembangan dan bimbingan.⁵ Ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan dalam bahasa romawi disebut *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam.⁶

Disamping dari sisi etimologis, istilah pendidikan juga bisa didekati dari aspek terminologis (istilah). Jika kita merujuk beberapa buku pendidikan, banyak sekali ditemukan definisi atau pengertian pendidikan yang diajukan oleh beberapa pakar dan tokoh pendidikan. Meskipun redaksi dari beberapa definisi tersebut berbeda namun hakikatnya, maksud dan cakupannya bisa dikatakan sama. Berikut ini saya kutipkan beberapa definisi pendidikan ditinjau dari aspek terminologinya.

Rechey dalam bukunya, *planing for teaching, an introduction*, sebagaimana dikutip oleh Tatang dalam bukunya Ilmu Pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan adalah;

The term education refers to the broad function of preserving and improving the life of the group through bringing new members into its shared concern. Education is thus a far broader process than that which occurs in school. It is an essential social activity by which communities continue to exist. In complex communities, this function is specialized and institutionalized in formal education, but there is always the education outside the school with which the formal process is related (istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama untuk memperkenalkan warga masyarakat baru (generasi muda) pada pengenalan terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya ditengah masyarakat. Jadi, proses pendidikan jauh lebih luas dari proses yang berlangsung di sekolah. Pendidikan adalah suatu aktivitas social penting yang berfungsi untuk mentransformasikan keadaan suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Keterkaitan pendidikan dengan keadaan social sangatlah erat sehingga pendidikan mungkin

³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 30. Dan lihat juga Ngalm Purwanto, *ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Pt Remaja Rosdakarya, 1998), 3

⁴ Penjelasan lengkap tentang tiga istilah ini bisa dibaca dibukunya Samsul Nizar, Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 84-86

⁵ Tatang, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 14

⁶ Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Arr-Ruz Media, 2006), 19.

menaglami spesialisasi dan institusionalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kompleks dan modern.meskipun demikian, proses pendidikan secara menyeluruh tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan informal yang berlangsung diluar sekolah).⁷

Hampir senada dengan pendapat Rechey di atas Hasan Langulung, sebagaimana dikutip oleh Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengemukakan bahwa pendidikan dapat ditinjau dari dua segi; pertama, dari sudut pandang masyarakat; kedua dari sudut pandang individu. Dari sudut pandang masyarakat pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan, dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke genarasi agar identitas masyarakat tersebut dapat terpelihara. Dari segi individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi.manusia mempunyai berbagai bakat dan kemampuan yang kalau dikelola secara cerdas bisa berubah menjadi emas dan intan.⁸

Sedangkan menurut undang-undang No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab I dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengmbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Beberapa definisi di atas merupakan definisi pendidikan secara umum. Definisi-definisi tersebut akan sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan pengertian atau definisi pendidikan Islam. Adanya sedikit perbedaan ini dikarenakan basis pijakan filosofisnya berbeda; baik dari sisi epistemology, ontology maupun aksiologinya. Selain dari aspek filosofinya, perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan umum juga bisa ditinjau dari segi sistemnya. Menurut Ramayulis perbedaan kedua sistem tersebut terletak pada sistem ideologinya, sistem nilainya dan juga orientasinya. Sistem pendidikan Islam berideologi *at-tauhid* bersumber dari al-Quran dan sunnah sementara pendidikan non- islam memiliki berbagai macam ideologi dan isme-isme seperti materialis, komunis, ateis, sosialis, kapitalis dan lain sebagainya. Dari sistem nilai, pendidikan Islam bersumber dari nilai-nilai *al-Quran* dan sunnah ditambah dengan

⁷ Tatang, *ilmu pendidikan*....., 13-14

⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*.....31.

ijtihad manusia (ulama), sedangkan pendidikan non-Islam bersumber dari nilai-nilai selain keduanya yang merupakan produk pemikiran manusia saja seperti adat, hasil pemikiran dan penelitian. Sedangkan dari segi orientasinya, pendidikan Islam berorientasi kepada kepentingan dunia akhirat sedangkan pendidikan non-islam lebih condong pada orientasi dunia saja⁹ Dari beberapa penjelasan ini dapat diketahui bahwa memang ada beberapa perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Tentu, hal ini juga akan berimplikasi pada konsepsi definisi dan konstruksi pendidikan Islam. Berikut ini akan dikutip beberapa definisi pendidikan Islam yang diajukan oleh beberapa tokoh dan juga yang dikutip dari beberapa hasil konferensi pendidikan yang sudah dibukukan.

Al-syaibaniy, mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah mengubah proses tingkah laku peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.¹⁰ Ahmad tafsir, merumuskan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.¹¹ Definisi ini lebih menekankan adanya proses pendidikan untuk mengaktualkan segala potensi yang ada dalam peserta didik yakni potensi intelektual maupun spiritual. Landasan proses pengembangannya harus sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Sementara, Ramayulis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat.¹² Dalam rumusan yang lain Ramayulis juga mendefinisikan pendidikan Islam dari segi sasaran pendidikan. Ditinjau dari segi ini definisi pendidikan menjadi definisi pendidikan secara umum dan definisi pendidikan secara khusus. Pendidikan secara umum dan khusus diartikan sebagai usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya, dengan berpedoman kepada syariat Islam. Namun dalam

⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*.....55-56.

¹⁰ Omar Muhammad At-Thoumy Al-Syaibaniy, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: bulan bintang,1979), 399.

¹¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1992), 32.

¹² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*.....38.

pendidikan secara khusus pengembangan potensi yang dimaksud sesuai dengan tahap perkembangan individu, jenis kelamin dan bakatnya.¹³

Dari semua definisi pendidikan di atas, baik definisi pendidikan secara umum maupun dari definisi pendidikan Islam, dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu proses atau aktivitas terencana, terstruktur, tersistem yang dilakukan untuk mengarahkan dan menumbuh kembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar mampu menjalani kehidupannya dengan baik dan lebih berkualitas, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Selain dari segi etimology dan terminology, pengertian pendidikan juga bisa ditinjau dari proses dan tempat berlangsungnya. Rumusan dari tinjauan ini biasanya dibagi menjadi dua bagian yakni; pendidikan dalam arti luas dan pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang dilalui oleh peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat.¹⁴ Definisi ini sama dengan definisi yang dipaparkan oleh Redja Mudyahardjo bahwa pendidikan dalam arti luas adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu.¹⁵ Sementara George F Kneller dalam Wiji Suwarno pendidikan dalam arti luas bermakna bahwa pendidikan sebagai tindakan atau pengamalan yang mempengaruhi perkembangan jiwa, watak atau kemauan fisik individu. Dalam arti sempit, pendidikan adalah suatu proses mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dari generasi kegenerasi yang dilakukana oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya.¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah proses kehidupan itu sendiri. Sehingga pendidikan dalam arti luas ini masih belum tersistem, belum terprogram dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Sementara pendidikan dalam arti sempit bermakna suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal (madrasah atau sekolah).¹⁷ Karakteristik dari pendidikan dalam makna ini adalah; masa/waktu melakukan aktivitas pendidikan terbatas, proses pendidikan lebih bercorak pengajaran, ruang pendidikan hanya terbatas di lingkungan sekolah. Pendidikan dalam arti sempit ini yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kita. Baik oleh

¹³ *Ibid.*, 40.

¹⁴ *Ibid.*, 39

¹⁵ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 3.

¹⁶ Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*...., 20.

¹⁷ *Ibid.*, 6. Lihat juga Ramayulis, *Ilmu Pendidikan*...., 40.

kalangan masyarakat *grass root* maupun masyarakat elit. Konsekuensinya, adalah upaya proses pendidikan berlangsung dalam waktu dan ruang yang sangat terbatas. Lebih jauh, konsekuensi tersebut melebar menjadi tidak adanya upaya dan kepedulian orang tua dan masyarakat untuk memberi pelayanan pendidikan di luar lingkungan sekolah kepada anak dan anggota masyarakatnya.

Akibat lain dari pendidikan dalam arti sempit ini adalah lembaga pendidikan menjadi lebih eksklusif, agak tertutup. Tertutup, bukan dalam memberi pelayanan pendidikan formal seperti yang selama ini berjalan, tentu dalam memberi pelayanan pendidikan semacam ini lembaga pendidikan memberikan kesempatan yang sama pada masyarakatnya, karena memang lembaga pendidikan butuh peserta didik (masyarakat) agar lembaga pendidikannya tetap hidup dan tidak mengalami mati suri. Agak tertutup yang dimaksud di sini adalah akses keterlibatan masyarakat dalam merumuskan bingkai awal, tengah dan akhir dari proses pendidikan sudah sangat terbatas. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu sebab mandulnya *out put* pendidikan di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting bagi semua lembaga pendidikan secara umum maupun pendidikan islam dan juga bagi masyarakat untuk mempunyai pemahaman bahwa pendidikan itu adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Maka, lembaga pendidikan harus dikelola secara seksama dan bersama-sama. Tentu, kebersamaan itu bukan dalam semua hal tapi dalam hal-hal tertentu yang memang butuh dan perlu untuk dikerjakan bersama. Di sisi lain, setiap anggota masyarakat dan juga stake holder pendidikan diharapkan mempunyai pandangan yang sama bahwa lingkungan pendidikan itu tidak hanya di sekolah tapi pendidikan juga harus berlangsung dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan alam. Dalam ilmu pendidikan, tiga lingkungan pendidikan ini dikenal dengan trisentis pendidikan.

Ditinjau dari sudut sejarah pendidikan Islam, pengertian pendidikan sebagaimana yang lazim dipahami seperti sekarang ini sebenarnya belum ditemukan pada awal munculnya agama Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW.¹⁸ Namun demikian, usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana yang termaktub dalam beberapa istilah pendidikan di atas yakni membimbing, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan lain sebagainya sudah sering dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan dakwahnya. Dengan demikian, kegiatan pendidikan sudah

¹⁸ Zakiah Derajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 27

dilakukan oleh Nabi meskipun pada saat itu masih belum dikenal dengan istilah pendidikan. Dari paparan singkat ini dapat diketahui bahwa Nabi adalah seorang pendidik yang berhasil karena mampu menciptakan masyarakat yang berkeadaban dan berkeperibadian sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Nabi menjalankan dakwahnya dengan berbagai metode dan cara. Selain itu, dakwah yang dilakukan oleh nabi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu seperti era sekarang ini.

Jika dikaji secara historis, kemunculan lembaga pendidikan Islam pada masa berikutnya merupakan sebuah keniscayaan. Semakin banyaknya orang yang masuk Islam pada saat itu dan sampai saat ini, tentu membutuhkan pengajaran-pengajaran dan pendidikan yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, atas dasar kebutuhan-kebutuhan masyarakat, maka munculah berbagai pemikiran untuk kemudian lebih mensistematisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam bentuk lembaga pendidikan maupun dalam bentuk kurikulum pendidikan. Menurut Hasan Abd al-Ali sebagaimana dikutip Ramayulis, pendidikan Islam sudah mengenal lembaga-lembaga pendidikan sejak detik-detik awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SWA. Rumah *Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam* merupakan lembaga pendidikan pertama, dan Nabi Muhammad adalah guru agung pertama¹⁹

Makna lembaga pendidikan secara etimologi adalah asal sesuatu, acuan atau sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha²⁰ Dari definisi tersebut lembaga pendidikan dapat dipahami dari dua aspek, yakni ;(1) lembaga pendidikan dalam arti bentuk fisik, materil dan kongkrit, (2) pengertian secara non fisik, non materil dan abstrak.²¹ Dari sisi terminology ada beberapa pengertian tentang lembaga pendidikan di antaranya; lembaga pendidikan Islam diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsung pendidikan Islam.²² Definisi yang lain menyebutkan bahwa lembaga pendidikan Islam adalah suatu sistem peraturan yang *mujarrad*, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideology-ideologi dan lain sebagainya, baik tertulis

¹⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam.....*, 313.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1990), Cet 1, 572.

²¹ M. Daud Ali Dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 12-13

²² Abu Ahmadi Dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991),

atau tidak, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, pelaksanaannya bisa dimesjid, sekolah, kuttab dan lain sebagainya.²³

Dari pengertian lembaga pendidikan secara terminologis di atas Ramayulis menjelaskan bahwa lembaga pendidikan dalam bentuk konkrit berupa sarana dan prasarana dan dalam bentuk abstrak berupa aturan-aturan atau norma-norma tertentu serta ada penanggung jawabnya.²⁴ Jadi, Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu institusi, badan, yayasan yang dibentuk untuk keperluan pendidikan dan sarana untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam. Dapat juga diartikan bahwa unsur-unsur lembaga pendidikan Islam bisa mencakup sesuatu yang bersifat non-fisik seperti peraturan dan juga yang bersifat fisik seperti bangunan, Kuttab, masjid dan sekolah.

Definisi lembaga pendidikan di atas merupakan rangkaian dari perjalanan panjang sejarah pendidikan dari waktu ke waktu, dari lembaga pendidikan yang bersifat tradisional-sederhana sampai ke lembaga pendidikan yang beraliran modern. Menurut Ramayulis bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek di antaranya adalah; (1) aspek azas ajaran Islam 2), aspek tempat dan waktu 3), aspek penanggung jawab.²⁵ Namun dalam paper ini tiga aspek tinjauan Ramayulis tersebut tidak akan dibahas semuanya, untuk lebih jelasnya bisa langsung dilihat di dalam bukunya. Dalam paper ini akan disebutkan dan dijelaskan beberapa lembaga pendidikan yang mempunyai peran penting dalam pengembangan pendidikan di dunia Islam . Berikut ini beberapa bentuk lembaga pendidikan Islam yang dimaksud.

1). Al-Kuttab; merupakan lembaga pendidikan Islam yang digagas pada masa awal pengembangan Islam yakni pada masa sahabat Abu Bakar dan Umar Bin Khattab.²⁶ Al-kuttab pada masa ini digunakan untuk mengajarkan masyarakat tentang al-quran dan pokok-pokok ajaran agama Islam disamping juga digunakan untuk belajar membaca dan menulis. Istilah al-kuttab sebenarnya sudah dikenal pada masa sebelum Islam, namun al-khuttab pada masa sebelum Islam ini hanya digunakan untuk membaca dan menulis.²⁷ Al-khuttab ini adakalanya dibangun oleh perorangan dan adakalanya dibangun oleh masyarakat secara gotong royong. tempat al-khuttab ini ada yang dibangun di dalam masjid ada juga yang dibangun

²³ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Mengahdapi Abad 21*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1998), Cet, 1, 12-13

²⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam.....*, 315

²⁵ *Ibid.*, 317

²⁶ Fakhru Razi Dalimunthe, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Medan: Raimbow, 1986), 87.

²⁷ *Ibid.*, 86.

Siful Arifin

di rumah para ulama, pengasuh atau pengajarnya.²⁸ Dalam proses belajar mengajarnya para murid dikirim oleh orang tuanya untuk mendatangi tempat khuttab yang sudah disediakan oleh pengasuhnya. Selain itu, para orang tua juga bisa memanggil gurunya untuk memberikan private lesson dirumahnya. Dalam mengadakan proses pengajaran seorang pengasuh ada yang mengambil upah dan ada yang tidak mengambil upah. Upah yang diterima oleh seorang pengajar bervariasi, adakalanya hanya diupah dengan roti dan lain sebagainya²⁹ Dalam pendidikan al-khuttab ini semua masyarakat bisa belajar, tidak dibedakan apakah mereka miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan semuanya bisa belajar. Dari deskripsi singkat tentang lembaga pendidikan al-khuttab ini, dapat diketahui bahwa sejak awal pendidikan Islam sudah menganut demokrasi dalam pendidikan. Masyarakat Islam terlibat aktif dalam membangun lembaga pendidikan dan juga peduli terhadap kesejahteraan para pengajarnya.

2), Masjid; masjid merupakan lembaga pendidikan tertua dan sudah dikenal sejak masa rasul. Di masjid-lah al-Qur'an dan dasar-dasar ajaran agama Islam diajarkan sebelum al-kuttab populer.³⁰ Sebelum masyarakat Islam mengenal al-khuttab masjid menjadi tempat mengenyam pendidikan bagi semua lapisan masyarakat tapi setelah al-khuttab dikenal masyarakat, maka kemudian masjid hanya digunakan untuk tingkat pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi dan tidak digunakan untuk pendidikan dasar yang kebanyakan diikuti oleh anak-anak, karena anak-anak dianggap tidak mampu menjaga kebersihan masjid. Pada masa Rasulullah, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah tapi juga digunakan untuk aktivitas lainnya, selain tempat pendidikan masjid juga digunakan peradilan, militer berkumpul, tempat menerima duta luar negeri dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, masjid sudah tidak lagi multi-fungsi. Masjid hanya digunakan menjadi tempat beribadah saja dan sangat jarang difungsikan sebagai lembaga pendidikan apalagi sebagai pusat kegiatan masyarakat lainnya. Beberapa masjid terkenal pada masa lalu yang sering digunakan sebagai tempat pendidikan diantaranya adalah: Jami' Amr Bin 'Ash, Jami' Ahmad Bin Thoulon, masjid al-manshur, masjid al-umayyah, dan lain sebagainya.³¹

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, 87.

³⁰ *Ibid.*, 89

³¹ Penjelasan lengkap tentang masjid-masjid tersebut bisa dilihat dalam Fakhur Razi Dalimunthe, *Sejarah Pendidikan Islam.....89-96*

3), Madrasah (sekolah); pada masa lalu madrasah merupakan lembaga pendidikan islam yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi. Lembaga ini mulai dikenal oleh kaum muslimin pada akhir abad IV Hijriah yakni pada saat kemenenagan Saljukiyah menaklukan Irak dan berhasil memasuki Baqdad.³² Orang yang berjasa dalam mendirikan lembaga ini adalah Perdana Menteri Malik Syah yang bernama Nizamul Mulk yang kemudian mendirikan Madrasah Nizamiyah di Bagdad dan di Naisabur dan juga Madrasah Hanafiyah di Bagdad. Sejak saat itu, kemudian muncullah lembaga madrasah lainnya diberbagai Negara Islam.³³ Beberapa madrasah yang dikenal dalam sejarah pendidikan Islam adalah; Madrasah Nizamiyah di Bagdad, Madrasah Al-Muntasiriyah di Bagdad, Madrasah An-Nasiriyah di Mesir dan Madrasah An-Nuriyah di Damaskus.³⁴

Selain tiga lembaga pendidikan di atas ada juga bentuk-bentuk lembaga lain yang dikembangkan oleh penguasa maupun masyarakat klasik Islam, di antara lembaga pendidikan yang mempunyai peran vital tersebut adalah; *darul hikmah* dan *darul ilmu*, *halaqatud dars* dan *al ijtima' at al'ilmiyah*, *duwarul kutub* (perpustakaan), *ribat*, *kesusastraan*,³⁵ Dari penjelasan tentang napak tilas perkembangan lembaga pendidikan Islam di atas dapat diklasifikasika bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang pernah dikembangkan dan sedang dikembangkan dalam dunia Islam itu ada tiga yakni; 1). pendidikan informal yang terdiri dari, pendidikan keluarga, 2), pendidikan non-formal yang terdiri dari pendidikan yang dibentuk masyarakat seperti: Masjid, Musholla, Surau, pesantren, *Majlis Ta'lim*, kursus-kursus keislaman dan lain sebagainya. 3), pendidikan formal seperti: Raudahatul Atfal TPQ, MI, SDI, MTS, SMPI, MA, MMA, STAIN, IAIN dan UIN.

Pendidikan Berbasis Masyarakat; Sebuah Perkenalan Lanjutan

Pendidikan berbasis masyarakat (PBM) yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *community based education* bukanlah sebuah konsep yang harus dipertentangkan dengan pendidikan berbasis Negara (*state based education*) yakni, pendidikan yang dikelola oleh Negara. PBM hanyalah sebagai salah satu alternatif ditengah kurang relevannya *out put* pendidikan dengan kondisi dan kebutuhan

³² *Ibid.*, 98.

³³ *Ibid.*, 98

³⁴ *Ibid.*, 99-106

³⁵ Penjelasan lengkap tentang tiga lembaga ini bisa dilihat Muhammad Munir Mursyi, *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Kutub, 1982), 199-201 lihat juga di Fakhurur Razi Dalimunthe, *Sejarah Pendidikan Islam...*, 96-110.

masyarakat dan kurang produktifnya pendidikan yang dikelola Negara dalam mencetak masyarakat yang berkualitas. PBM juga bisa diposisikan sebagai mitra dari pendidikan yang berbasis Negara, karena masyarakat dan Negara merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Tidak mungkin ada Negara jika tidak ada masyarakat begitu juga sebaliknya. Pendidikan yang dikelola oleh Negara secara administratif juga bisa menggunakan paradigma pendidikan berbasis masyarakat jika dalam pengelolaannya lebih banyak membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Secara konseptual pendidikan, PBM adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “ dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat berarti masyarakat di tempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat diharapkan dan dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat berarti masyarakat diikutsertakan dalam setiap program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat bisa dikatakan, masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.³⁶ Pendidikan berbasis masyarakat juga merupakan model pengelolaan pendidikan yang menempatkan peran masyarakat secara otonom untuk menentukan, mengatur, dan menyelenggarakan pendidikan sesuai aspirasi dan kebutuhannya.³⁷

Pendidikan berbasis masyarakat bekerja atas asumsi bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik masyarakat kota maupun masyarakat desa telah memiliki potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka miliki sendiri serta dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang

³⁶ Winarno Surakhmad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Semarang: Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Tengah, 2002), 16.

³⁷ Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat :Konsep dan Strategi implementasi*, (Jakarta : Raja Graifindo, 2014), 6.

mereka hadapi.³⁸ Pendapat lain tentang pendidikan berbasis masyarakat dikemukakan oleh Mark K Smith sebagaimana dikutip oleh Zubaedi sebagai berikut:

As a process a designed to enrich the live of individuals and groupby engaging with people living within a geographical area, or sharing of common interest, to develop voluntarily a range of learning, action and reflection opportunities, determined by their personal, social, economic and political need.(Pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang di desain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengemabangkan dengan suka rela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, social, ekonomi dan kebutuhan politik mereka).³⁹

PBM, Selain dikenal dengan istilah *community based education* juga dikenal dengan dengan *community education for development* (pendidikan masyarakat untuk pengembangan) dari istilah ini kemudian didefinisikan pbm sebagai proses yang menjadi jalan bagi anggota masyarakat agar mampu mengidentifikasi problem dan kebutuhannya, mencari solusi dianatar mereka sendiri, memobilisasi sumber-sumber yang ada seperlunya dan melakukan renacana tindakan atau pembelajaran atau kedua-duanya.⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas,dapat dipahami bahwa pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada ditangan masyarakat. Dalam pendekatan ini masyarakat dianggap sebagai agen sekaligus tujuan utama dari setiap proses dan program pendidikan yang dilakukan. Dengan demikian dapat ditarik suatu pemahaman jika masyarakat mempunyai otoritas dalam mengambil keputusan dan bisa menentukan tujuan pendidikan, sasaran, pembiayaan, kurikulum, perekrutan guru, kualifikasi guru, metode perekrutan siswa dan lain sebagainya maka pendidikan semacam ini bisa dikatakan pendidikan berbasis masyarakat. Namun apabila, jika hal-hal yang dimaksud di atas masih ditentukan oleh pemerintah, maka model pendidikan tersebut masih dikatakan sebagai pendidikan berbasis pemerintah (*state based*

³⁸ Definisi ini merupakan definisi yang diutarakan E Hamilton & P Cunningham dalam bukunya yang berjudul *community based adult education*, definisi tersebut dikutip dari Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),132

³⁹ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 133

⁴⁰ *Ibid.*, 134.

Siful Arifin

education). Atau, jika semua ditentukan oleh sekolah, maka disebut pendidikan berbasis sekolah (*school based education*).

Adanya pendidikan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk lebih memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan keterampilan khusus seperti pelatihan karir, konsumerisme, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dasar, budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan politik dan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, penanganan masalah kesehatan seperti korban narkoba, HIV/AIDS dan sejenisnya. Sementara lembaga yang bisa memberikan pendidikan kemasyarakatan bisa dari kalangan bisnis dan industry, lembaga-lembaga berbasis masyarakat, perhimpunan petani, organisasi kesehatan, organisasi pelayanan kemanusiaan, organisasi buruh, perpustakaan, museum, organisasi persaudaraan social, lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain.⁴¹ dari sini dapat diketahui bahwa pendidikan berbasis masyarakat diselenggarakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ditinjau dari legalitasnya, pendidikan berbasis masyarakat ini sebenarnya sudah masuk dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara tersirat, PBM dalam undang-undang tersebut disebut sebagai jenis pendidikan non-formal. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/ pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan pendidikan formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembagn sikap dan keperibadian fungsional. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditunjukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.⁴²

Dari uraian yang tercantum dalam UU Sisdiknas di atas, pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks Indonesia menunjuk pada beberapa pengertian

⁴¹ Michael W Galbraith, dalam Zubaedi, *Pendidikan Berbasis....133*.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sekretariat Negara Republic Indonesia, 8 juli 2003).

yang berbeda-beda.⁴³ Diantaranya; 1) pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput (*grass root organization*) seperti LSM dan pesantren, 2) pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan, 3) pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik swasta, 4) pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah, 5) pusat kegiatan belajar masyarakat, 6) pengambilan keputusan yang berbasis masyarakat. Model-model dan jenis pendidikan berbasis masyarakat di atas harus berlandaskan pada keyakinan dasar dan prinsip dasar bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah hal yang pokok.

Secara prinsip, pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jenis dan model pendidikan berbasis masyarakat ini bisa bervariasi tergantung dari keinginan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, PBM dibuat oleh masyarakat untuk membelajarkan dan mengembangkan dirinya sendiri sehingga lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang dihadapinya. Lebih luas Michael W Galbraith sebagaimana dikutip oleh Zubaedi menjelaskan beberapa prinsip pendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut.⁴⁴

- 1) *Self determination* (menentukan sendiri); semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
- 2) *Self help* (menolong diri sendiri); anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.
- 3) *leadership development* (pengembangan kepemimpinan); para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.

⁴³ Faisal Jalal& Dedi Supriyadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001),186

⁴⁴ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis.....*, 137-138.

Siful Arifin

- 4) *Localization* (lokalisasi). potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
- 5) *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan) adanya hubungan antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- 6) *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi pelayanan) masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengkoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.
- 7) *accept diversity* (menerima perbedaan) menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. ini berarti melibatkan warga masyarakat perlu dilakukan seluas mungkin dan mereka didorong/ dituntut untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan.
- 8) *institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan) pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat. lembaga harus dapat dengan cepat merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan
- 9) *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup) kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat.

Dari prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat di atas maka dapat diketahui bahwa peran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat sangatlah dominan. Mengacu pada prinsip-prinsip di atas maka sudah seyogyanya tidak ada lagi pendidikan yang mengasingkan atau tidak mengikutsertakan masyarakat dalam rencana dan program pendidikannya.

Revitalisasi; Sebuah Upaya Mengembalikan Fungsi dan Eksistensi Pendidikan Islam

Jika ditinjau dari sejarah, pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat Islam tempo dulu, hal ini bisa dilihat dari penjelasan tentang pendidikan Islam ditinjau dari sisi sejarah yang sudah dijelaskan diawal paper ini, selain itu juga bisa dilihat dari berbagai sumber

lainnya. Sebenarnya, pendidikan Islam berbasis masyarakat ini masih dijumpai sampai sekarang, namun belakangan ini model pendidikan yang dimaksud kalah populer dengan lembaga-lembaga pendidikan formal yang lebih bercorak sentralistik.

Keterlibatan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam melakukan pendidikan juga dapat dijumpai pada masyarakat Islam di Indonesia. Jauh sebelum pemerintah mendirikan sekolah atau madrasah formal sebagaimana dijumpai sekarang ini, umat Islam di Indonesia sudah memiliki surau, langgar, mushalla, *majelis ta'lim*, masjid, dan pesantren. Lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan dibangun atas dasar kemauan dan kesadaran masyarakat sendiri, dan digunakan selain untuk kegiatan ibadah dan kegiatan social keagamaan, juga digunakan untuk kegiatan pendidikan.⁴⁵ Namun, seiring dengan berjalannya waktu, model-model pendidikan bernuansa masyarakat sebagaimana disebutkan di atas mulai hilang dan terpinggirkan berganti dengan model dan sistem pendidikan baru yang konon lebih modern dan lebih sistematis, sementara model pendidikan yang sebelumnya dianggap ketinggalan zaman. Ironisnya, pendidikan model baru yang dianggap lebih baik itu ternyata belum mampu menjawab problematika yang dihadapi masyarakat. Sementara, disisi lain pendidikan dengan pola lama yang dianggap ketinggalan zaman itu sudah terbukti dalam sejarah bahwa pendidikan dengan model tradisional itu mampu mencetak pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter.

Keadaan terbalik seperti inilah yang mengharuskan kita untuk berpikir ulang mengenai sistem dan pola pendidikan kita. Antara mempertahankan dan menjalankan sistem pendidikan yang sudah ada dan tersedia, atau kembali bernostalgia dengan pendidikan masalah yang terbukti keampuhannya. Meskipun demikian, tentu kita tidak harus menjiplak model dan sistem pendidikan tradisional secara utuh namun perlu ada pembaruan-pembaruan yang konstruktif dan dinamis untuk membangun suatu konstruksi pendidikan yang lebih baik. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah upaya re-vitalisasi.

Upaya re-vitalisasi ini bisa dilakukan dalam beberapa aspek dan sistem pendidikan. Dintinjau dari ruang lingkupnya, upaya revitalisasi bisa dilakukan dalam pendidikan formal, non-formal dan informal. Upaya revitalisasi dalam tiga model pendidikan tersebut bisa dilakukan dalam beberapa aspek diantaranya adalah;

⁴⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, Cet. I, 2001), 6-9.

- 1) Revitalisasi terhadap paradigma dan ideologi pendidikan masyarakat. Dari 3 model pendidikan di atas, masyarakat sering kali lebih mengarusutamakan pendidikan formal dan cenderung mengesampingkan pendidikan non-formal dan informal. Padahal, ketiga model tersebut saling berkaitan dan tidak boleh dikotakkan, meskipun peran dan fungsinya secara administratif dan normatif berbeda namun hakikat dari tiga pendidikan tersebut sama, yakni sama-sama ingin membantu masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki. Sepintas, jika dicermati ketiga pendidikan tersebut punya peran dan penekanan yang berbeda dalam melaksanakan proses pendidikan. Dalam pendidikan formal misalnya, aspek intelektual yang diutamakan, sementara pendidikan non-formal yang banyak berlangsung di masyarakat dapat mengasah aspek emosional dari peserta didik sedangkan pendidikan informal yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga lebih menekankan terhadap kecerdasan spritual. Dengan demikian, maka paradigma masyarakat terhadap tiga model pendidikan di atas harus holistik dan tidak boleh parsial. Masyarakat harus punya pemahaman bahwa tiga pendidikan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan secara simultan.
- 2) Revitalisasi terhadap design kurikulum dan *hidden curriculum* yang diagendakan. Sudah jamak diketahui bahwa sistem pendidikan kita, utamanya sistem pendidikan formal sering kali gonta ganti kurikulum yang secara langsung atau tidak langsung ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan formal maupun informal. Hal ini terjadi karena ada kecenderungan dua model pendidikan terakhir sering kali ikut arus pendidikan formal. Baik dari segi materi, waktu dan lain sebagainya. Meskipun sudah diberlakukan desentralisasi pendidikan namun wajah sentralisasi pendidikan masih terasa adanya karena proses pendidikan dan pengajaran masih dikontrol oleh pusat. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi dari aspek kurikulumnya. Kurikulum suatu lembaga pendidikan harus benar-benar mempunyai ciri khas tersendiri dan bisa berbeda dengan kurikulum lembaga lainnya. Dalam pendidikan non-formal dan informal, pelaku pendidikan harus memberikan materi yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam kehidupan keluarga yang masuk kategori pendidikan informal maka keluarga harus terus memperbaharui informasi dan ilmunya untuk memberikan pengalaman dan pendidikan yang baru kepada anggota keluarganya.
- 3) Revitalisasi terhadap sumber ekonomi lembaga pendidikan. Dulu lembaga pendidikan didirikan oleh masyarakat atas jasa gotong royong dan sumbangsih

secara ikhlas dari masyarakat. Sehingga masyarakat mempunyai rasa kepemilikan yang kuat terhadap lembaga dan merasa ikut bertanggung jawab terhadap maju mundurnya lembaga pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, seringkali lembaga pendidikan yang didirikan atas jasa masyarakat tersebut berpindah pengelolaannya dan statusnya atas menjadi milik perseorangan. Karena statusnya yang berubah menjadi milik perseorangan, biasanya yang mengelola lembaga tersebut berafiliasi dengan lembaga lain, baik lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghidupi lembaganya, sayangnya, penggelapan dana sering kali terjadi dalam mekanisme yang seperti ini. Fenomena seperti ini sudah sering kali terjadi disetiap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap stake holder pendidikan dan juga masyarakat membiayai pendidikan dengan cara-cara yang baik.

- 4) Revitalisasi terhadap lingkungan serta sarana dan prasarana pendidikan. Belakangan ini, banyak lembaga pendidikan formal maupun non formal kekurangan lahan dan juga kekurangan sarana prasarana penunjuang pendidikan. sebenarnya, hal ini bisa dicarikan jalan keluarnya jika masyarakat yang mempunyai kemampuan juga ikut berpartisipasi aktif dalam pendidikan dengan menyumbangkan kelebihan yang dimilikinya. Selain cara tersebut, masih ada cara-cara lainnya bisa dilaksanakan tergantung dari keadaan kebutuhan yang ada.

Selain ulasan diatas, berikut ini ulasan secara umum mengenai pentingnya melakukan upaya revitalisasi dalam beberapa aspek pendidikan. Dalam pendidikan formal, yang pengelolaannya sering dikelola oleh pemerintah dan swasta (perorangan, kelompok) maka diperlukan adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan dan mengembangkan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan formal ini tidak hanya bersifat struktural-formal seperti yang selama ini dilakukan, namun perlu adanya partisipasi dan peran yang lebih nyata, seperti dalam perencanaan dan pelaksanaannya serta evaluasinya, masyarakat diajak bermusyawarah untuk mendesign sendiri model pendidikan yang dibutuhkannya. Misalnya, lembaga pendidikan yang ada dalam lingkungan masyarakat petani, lembaga pendidikan dan masyarakat bisa saling mengisi program pendidikan terkait dengan usaha pengembangan pertanian. Lembaga pendidikan lebih menekankan SDM-nya supaya lebih mumpuni dalam aspek teorinya, sedangkan masyarakat diberi tanggung jawab untuk bersama-sama dengan peserta didik untuk mempraktikkan

dan mengembangkan usaha taninya. Dalam hal ini, lembaga pendidikan bisa menggunakan lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan masyarakat tidak hanya bersifat temporal tapi diharapkan bisa bersifat permanen. Dengan demikian maka, kebijakan dan praktek tentang sistem dan format pendidikan yang dijalankannya tidak hanya bersifat *top-down* tapi juga bersifat *bottom-up*. Dalam posisi ini, masyarakat merupakan mitra kerja pemerintah atau merupakan mitra kerja lembaga pendidikan swasta dan juga mitra stake holder pendidikan lainnya.

Dalam upaya menumbuhkan tingkat kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan, maka perlu ada langkah-langkah konkrit di antaranya adalah; 1), memberikan sosialisasi dan penjelasan yang benar kepada masyarakat tentang adanya desentralisasi pendidikan dan demokratisasi pendidikan. 2), Memperkuat dan memperbanyak organisasi kemasyarakatan yang bersinergi dengan lembaga pendidikan. 3), memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam dunia pendidikan tanpa memandang status sosialnya, tentu partisipasi aktif ini di bagi sesuai dengan peran, fungsi dan keahlian yang dimilikinya. 4), mengadakan forum-forum diskusi publik atau *hearing* dengan masyarakat terkait dengan kondisi, realitas dan problematika yang dihadapi masyarakat. 5) mengadakan pelatihan-pelatihan yang bernuansa kemasyarakatan, dengan mengambil tema-tema yang berkaitan dengan masyarakat.

Disamping langkah-langkah di atas, yang terpenting adalah menyadarkan kepada semua masyarakat bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia dan keterlibatan didalamnya merupakan suatu keharusan yang menjadi tanggung jawab bersama bagi semua anggota masyarakat. Pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan swasta hanya sebagai patner untuk memberikan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, maka ketergantungan masyarakat secara total dan utuh terhadap pemerintah harus dikikis dan dikurangi, bahkan dihilangkan dari alam pikirnya. Pemikiran seperti ini tidaklah bertentangan dengan amanat UUD yang mengamanatkan kepada negara atau pemerintah agar mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran seperti ini hanya sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan bukanlah kebutuhan sekunder manusia, tapi pendidikan adalah kebutuhan primer manusia yang harus dan wajib dilaksanakan oleh dirinya selama hidupnya.

Penutup

Mengembalikan fungsi dan jati diri pendidikan, khususnya pendidikan Islam di tengah kondisi masyarakat yang masih jauh dari kesejahteraan dan masih berselimut kebodohan adalah suatu upaya penting untuk dilakukan. Revitalisasi, merupakan upaya alternatif agar pendidikan Islam kembali menemukan marwahnya dan mampu berdiri tegak untuk memberikan pelayanan dan suguhan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, perlu adanya perubahan yang dinamis dalam melakukan upaya revitalisasi. Upaya revitalisasi tidak hanya berlangsung pada satu aspek dan bidang, tapi harus dilakukan secara holistik sesuai dengan keadaan, kemampuan dan kebutuhannya.

Berangkat dari realitas dan kondisi pendidikan Islam yang sudah dan sedang berjalan saat ini, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal, maka upaya revitalisasi tersebut bisa dilakukan dalam beberapa aspek diantaranya adalah; 1). Revitalisasi terhadap paradigma dan ideologi pendidikan masyarakat. 2). Revitalisasi terhadap design kurikulum dan *hidden curriculum* yang diagendakan. 3) Revitalisasi terhadap sumber ekonomi lembaga pendidikan.4). Revitalisasi terhadap lingkungan serta sarana dan prasarana pendidikan. Namun, empat aspek tersebut belum cukup untuk mendapatkan hasil yang terbaik, harus ada aspek-aspek lainnya yang diupayakan adanya proses revitalisasi.

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa upaya revitalisasi itu harus bersifat dinamis, bukan bersifat statis. Oleh karena itu, pada aspek-aspek yang lain juga bisa dilakukan upaya revitalisasi tidak hanya berhenti pada empat aspek tersebut di atas, tapi juga bisa berlaku pada aspek-aspek lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu Dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Al-Syaibaniy, Omar Muhammad At-Thoumy. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dalimunthe, Fakhrur Razi. 1986. *Sejarah Pendidikan Islam*, Medan: Raimbow.
- Daud Ali M. Dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarata: Balai Pustaka.

Siful Arifin

- Derajat, Zakiah. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fuad, Nurhattati. 2014. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat :Konsep dan Strategi implementasi*, Jakarta : Raja Graifindo.
- Jalal, Faisal & Dedi Supriyadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Langgulong, Hasan. 1998. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Mudyahardjo, Redja. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nata, Abuddin. 2011. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Nizar, Samsul, Ramayulis. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Purwanto, Ngalm 1998. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Paraktis*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramayulis. 2013. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia,
- Suwarno, Wiji. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Arr-Ruz Media.
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tatang. 2012. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Secretariat Negara Republic Indonesia, 8 juli 2003.
- Winarno, Surakhmad. 2002. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Berbasis Sekolah*,(Semarang: Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Tengah.
- Zubaedi. 2006. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.